

Analysis of the Influence of ROR, GAF, SAF, and Capital Expenditures on Regional Financial Independence

Hanif Farhan Dewanto¹ , Nursiam²

¹ Department of Economy, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

² Department of Economy, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 haniffarhan91@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain research evidence on the effect of Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Capital Expenditures on the level of Regional Financial Independence in the Surakarta Residency area in 2015-2019. The research method used in this study is a quantitative method. The data used is secondary data obtained from the official website of BPK RI (www.bpk.co.id). The samples used in this study were 7 districts/cities in the Residency of Surakarta using the census sampling technique or the saturated sample technique for 5 years so that 35 samples were obtained. This study use multiple regression data analysis technique with SPSS version 18 to process data. The test results show that local revenue has a positive and significant effect on regional financial independence, general allocation funds and capital expenditures have no effect on regional financial independence and special allocation funds have a negative and significant effect on regional financial independence.

Keywords: *Regional Financial Independence; Regional Original Revenue; General Allocation Fund; Special Allocation Fund; Capital Expenditure.*

Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Karesidenan Surakarta tahun 2015-2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BPK RI (www.bpk.co.id). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta, dengan menggunakan teknik sampel jenuh dan periode pengamatan 5 tahun, maka diperoleh 35 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan program SPSS versi 18 untuk mengolah data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Belanja Modal.

1. Pendahuluan

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan

keuangan daerah. Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga sebagai tantangan. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan akan semakin mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan yang dibutuhkan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah guna meningkatkan kemandirian daerah (Prakarsa, 2014).

Pendapatan asli daerah merupakan hal utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara dana alokasi umum serta berbagai bentuk transfer lainnya dari pemerintah pusat hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Semakin kecil tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Pendapatan asli daerah inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang benar-benar di gali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi nyata daerah. Jika struktur pendapatan asli daerah sudah kuat, maka daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat juga.

Menurut Abdullah, dkk (2015) kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dan diukur dari besarnya efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh tiap pemerintah daerah baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota jika dibandingkan dengan dana yang berasal dari pihak luar daerah, seperti dana bantuan dari pemerintah pusat atau dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan dana pinjaman. Selain itu kemandirian keuangan suatu daerah dapat menunjukkan tingkat pencapaian dan keberhasilan atas kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Belanja Modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya (Darise, 2009).

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, penulis mengambil judul: “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2019)”.

1. Literatur Review

1.1. Teori Anggaran

Menurut Mahmudi (2010) salah satu jenis sistem anggaran yang digunakan dalam pelayanan sektor publik adalah anggaran kinerja atau *performance-based budgeting* yang dikenal dengan sebutan *Value for Money*. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasari oleh tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan pentingnya anggaran sektor publik dalam memiliki beberapa alasan yaitu anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas,

dan anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Halim (2007:284) memberikan pandangan bahwa besaran pendapatan yang diperoleh langsung daerah akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Sehingga apabila tingkat pendapatan asli suatu daerah tinggi maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut juga akan tinggi.

Dalam penelitian Susanti, Rahayu dan Yudowati (2016) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah. Konsisten dengan penelitian Tahar dan Zakhiya (2011), Apriana dan Suryanto (2010) menemukan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh pendapatan asli daerah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang besar akan menyebabkan meningkatnya kemandirian daerah juga semakin besar. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Halim, 2014). Dana alokasi umum sendiri merupakan salah satu pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah. Daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap dana alokasi umum cenderung tidak mandiri. Artinya semakin besar penerimaan dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah cenderung menurun.

Dalam penelitian Kustianingsih (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima daerah maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah akan menurun begitu juga sebaliknya. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan skala prioritas nasional. Dasar hukum yang mengatur tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. Daerah yang menerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan bersumber dari PAD setempat.

Daerah yang memenuhi kriteria pada setiap tahunnya akan diberikan DAK. Penggunaan dana tersebut diutamakan untuk proses pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Dengan DAK diharapkan terjadi pemerataan dalam pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat. Penelitian Verawaty, Fransisca dan Rahmawati (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.5. Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Dana yang digunakan untuk belanja modal dapat berasal dari pendapatan asli daerah maupun bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Belanja modal bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan di berbagai sektor. Apabila suatu daerah tingkat operasionalnya baik dan sarana prasarannya baik maka dapat menunjang kelancaran usaha sehingga kemandirian dapat tercapai. Dalam penelitian Sari (2015) di Yogyakarta menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Ariani pada tahun 2016 di Jawa Tengah juga menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu Belanja Modal berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan alokasi Belanja Modal suatu daerah maka Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menjadi naik. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H4: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

1.6. Kemandirian Keuangan Daerah

Tercantum pada Pasal 1 Ayat 5 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Halim (2007), Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015 ISBN 978-602-73690-3-0 539 Universitas PGRI Yogyakarta adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis untuk menguji terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Karesidenan Surakarta. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta yang berjumlah 7 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Surakarta, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan Boyolali tahun 2015-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode *sensus sampling* atau teknik sampel jenuh, yaitu seluruh populasi yang ada di dalam penelitian dijadikan sebagai sampel. Dari pengambilan sampel tersebut diperoleh 35 sampel yang terdiri dari 7 Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta selama 5 tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2019 yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atau yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2015-2019. Data tersebut bersumber dari website resmi BPK RI Pusat di Jakarta yaitu www.bpk.go.id atau dapat diperoleh langsung melalui surat elektronik Badan Pemeriksaan Keuangan Pusat dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu metode studi pustaka dan metode dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi). Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh hasil statistik deskriptif variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, mempunyai nilai minimum sebesar 8,752909 dan nilai maksimum sebesar 29,244312 dengan rata-rata nilai sebesar 16,96415295 dan standar deviasi sebesar 5,27271559. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio kemandirian di wilayah Eks Karesidenan Surakarta memiliki nilai yang baik. Variabel Pendapatan Asli

Daerah (PAD) mempunyai nilai minimum sebesar 190,622670 dan nilai maksimum sebesar 546,020008 dengan nilai rata-rata sebesar 351,51896695 dan standar deviasi sebesar 90,335484960. Berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah Eks Karesidenan Surakarta cukup baik dan tinggi. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) yang mempunyai nilai minimum sebesar 43,989524 dan nilai maksimum sebesar 56,285133 dengan nilai rata-rata sebesar 48,14108963 dan standar deviasi sebesar 2,923634387. Berarti bahwa pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom di wilayah Eks Karesidenan Surakarta terlaksana dengan baik. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mempunyai nilai minimum sebesar 0,239091 dan nilai maksimum sebesar 17,529532 dengan nilai rata-rata sebesar 12,02845176 dan standar deviasi senilai 4,418369001. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan pemerintah pusat di wilayah Eks Karesidenan Surakarta mempunyai nilai yang cukup besar. Variabel Belanja Modal yang mempunyai nilai minimum sebesar 12,370266 dan nilai maksimum sebesar 27,368259 dengan nilai rata-rata sebesar 19,53991796 dan standar deviasi senilai 4,221774002. Pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode di wilayah Eks Karesidenan Surakarta cukup baik.

3.2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak Ghazali (2011:160). dalam penelitian ini digunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Model regresi dikatakan memiliki residual berdistribusi normal apabila Asymp. Sig (2-tailed) di atas signifikansi sebesar 0,05. Hasil uji normalitas pada penelitian ini sebesar 0,720 > 0,05 sehingga data dinyatakan terdistribusi dengan normal.

3.3. Uji Autokorelasi

Untuk melakukan autokorelasi menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test) yang hanya digunakan untuk korelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstan) dalam regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hasil uji autokorelasi dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,558. Nilai Durbin-Watson dari model data berada diantara -2 dan 2, menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada persamaan regresi.

3.4. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Apabila nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka variabel independen yang digunakan terlepas dari permasalahan multikolinieritas (Ghozali:2011). Hasil uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tolerance sebesar 0,331 dan VIF sebesar 3,018. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki tolerance sebesar 0,362 dan VIF sebesar 2,760. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki tolerance sebesar 0,925 dan VIF sebesar 1,081. Dan belanja modal memiliki tolerance sebesar 0,736 dan VIF sebesar 1,358.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF dibawah 10, menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.

3.5. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian ini untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dapat diketahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dari kepercayaan 5%. Nilai signifikan yang menunjukkan lebih dari 0,05 berarti model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas begitu pula sebaliknya (Ghozali, 2011). Hasil uji heteroskedastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,176. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai sebesar 0,220. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai sebesar 0,783. Dan Belanja Modal memiliki nilai sebesar 0,604. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 5%.

3.6. Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda memiliki tujuan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2016), analisis regresi linear berganda untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari uji regresi linear berganda, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{KKD} = -12,168 + 0,061 \text{ PAD} + 0,222 \text{ DAU} - 0,298 \text{ DAK} + 0,020 \text{ BM} + e$$

Keterangan:

KKD = Kemandirian Keuangan Daerah
 PAD = Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 DAU = Variabel Dana Alokasi Umum (DAU)
 DAK = Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)
 BM = Variabel Belanja Modal
 e = *Error*

Nilai konstanta sebesar -12,168 menunjukkan bahwa jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka, Kemandirian Keuangan Daerah akan mengalami penurunan. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,061 yang berarti apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Kemandirian Keuangan Daerah akan naik dan begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,222 yang berarti apabila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat maka Kemandirian Keuangan Daerah akan naik dan sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -2,298 yang berarti apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) meningkat maka Kemandirian Keuangan Daerah akan turun dan sebaliknya, apabila Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun Kemandirian Keuangan Daerah akan naik. Nilai koefisien regresi variabel Belanja Modal sebesar 0,020 yang berarti apabila Belanja Modal meningkat maka Kemandirian Keuangan Daerah akan naik dan sebaliknya, apabila Belanja Modal menurun maka Kemandirian Keuangan Daerah akan turun.

3.7. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali:2011), pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik turunnya variabel dependen. Hasil perhitungan untuk nilai *adjusted* R^2

dengan bantuan program SPSS, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau adjusted R² sebesar 0,901. Hal ini berarti bahwa 90,1% variabel Kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal sementara sisanya 9,9% diterangkan oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

3.8. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan (bersama-sama) memengaruhi variabel dependen (Ghozali:2011). Apabila nilai F hitung \geq nilai F tabel dan probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 maka variabel independen dikatakan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan model regresi dapat dikatakan layak.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai F (77,977) dengan signifikansi (0,000) $<$ α (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hal ini juga berarti bahwa model regresi yang dipakai *fit of goodness*.

3.9. Uji Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2011:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan probabilitas signifikansi 0,05.

Tabel 1. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	-12,168	9,406		-1294,000	0,206
PAD	0,061	0,005	1054,000	11,215	0,000
DAU	0,222	0,162	0,123	1,373	0,180
DAK	-.298	0,067	-0,250	-4,437	0,000
BM	0,020	0,079	0,016	0,253	0,802

Berdasarkan hasil uji pada [tabel 1](#), diketahui bahwa sig variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,000 $<$ 0,05 dan nilai T hitung sebesar 11,215 $>$ T tabel sebesar 2,042 sehingga **H1 diterima** dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan mengakibatkan peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta, sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh mengalami penurunan maka Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta juga akan menurun. Dalam otonomi daerah dengan sumber keuangan dari PAD lebih penting dibandingkan dengan sumber lain karena perlu adanya optimalisasi sumber-sumber PAD demi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Rahayu dan Yudowati (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan asli suatu daerah maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut juga akan tinggi.

Signifikansi variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar $0,180 > 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $1,373 > 2,042$ sehingga **H2 ditolak** dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hal ini membuktikan bahwa, jika Dana Alokasi Umum (DAU) bertambah atau meningkat maka akan mengurangi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Pengalokasian DAU yang dilakukan pemerintah pusat belum dimanfaatkan secara efektif oleh daerah sehingga output yang dihasilkan belum maksimal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nindita dan Rahayu (2018) yang meneliti pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Signifikansi variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $-4,437 < -2,042$ sehingga **H3 diterima** dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar DAK yang diterima oleh daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta semakin rendah. DAK dialokasikan kepada suatu daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program prioritas nasional dan membantu kebutuhan sarana dan prasarana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kustianingsih, Muslimin dan Kahar (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Signifikansi variabel belanja modal sebesar $0,802 > 0,05$ dan nilai T hitung sebesar $0,253 < 2,042$ sehingga **H4 ditolak** dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Baik adanya peningkatan maupun penurunan alokasi Belanja Modal suatu daerah maka tidak memengaruhi perubahan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Belanja Modal yang di anggarkan pemerintah daerah yang berasal dari penerimaan daerah tidak bisa meningkatkan kemandirian keuangan daerah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Alokasi belanja modal yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah yang lemah sehingga membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Malau (2020) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah di wilayah eks Karesidenan Surakarta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Dalam pembuatan penelitian ini penelitian hanya dibatasi pada Kabupaten/Kota di wilayah Karesidenan Surakarta yang mana hanya meliputi 7 kabupaten/kota, sehingga belum dapat di generalisasikan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini terbatas hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja modal. Serta rentang waktu yang digunakan hanya selama 5 tahun yaitu dari tahun 2015-2019 sehingga belum bisa digeneralisasikan.

Saran untuk penelitian ini adalah disarankan untuk menambah jumlah sampel yang diteliti, misalnya kabupaten/kota di luar wilayah Karesidenan Surakarta atau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/kota di luar wilayah Karesidenan Surakarta dan agar dapat digeneralisasikan untuk seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain sebagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, seperti ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk, belanja daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Serta disarankan untuk menambah rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut

Referensi

- [1] Ariani, K. R., & Putri, G. A. (2016) "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah", Universitas Muhammadiyah Surakarta, ISSN 2460-0784.
- [2] Ernawati, "Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 6. no. 2, pp 531-545, 2017.
- [3] Ghozali I, "Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23", Edisi Delapan, Penerbit BPUD, Semarang, 2016.
- [4] Handayani, T, U., & Erinos, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018)", *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp2348-2361, 2020.
- [5] Haryanto H, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017", *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 8, no. 2, 2019.
- [6] Malau, E.I., & Parapat, E. P. S(2020). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, vol. 3, no. 2, pp. 332-337, 2020.
- [7] Nindita, N. L, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat," *Sustainability*, vol. 5, no. 12, pp. 5020–5033, 2013. *JAF-Journal of Accounting and Finance*, vol.2 no.1,pp. 12-19.
- [8] Sari, P. I. (2015) "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah", Universitas PGRI, Yogyakarta: 537-545.
- [9] Susanti, D., Rahayu, S., & Yudowati, S, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Dearah (Studi Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014),"Universitas Telkom, Bandung, ISSN: 2355-9357, 2016.
- [10] Verawaty, V., Fransisca, S., & Rahmawati, R, "Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Palembang," *Journal Management, Business, and Accounting*, vol. 16, no. 1, pp. 1-10, 2017.

- [11] Tjahjono, Achmad, & Rika Oktavianti, “Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY”, *Jurnal Kajian Bisnis*, vol. 24, no. 1, pp. 25-34, 2016.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
